

INSTRUMEN

EVALUASI MUTU INTERNAL (EMI)

UNIVERSITAS / INSTITUT /SEKOLAH TINGGI

A. STANDAR ISI

1. Kurikulum	
1.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum.	
7	Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala kurang atau setiap 4 tahun.
6	Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala lebih dari 4 tahun.
5	Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, tetapi tidak ada pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
4	Ada dokumen tentang kebijakan, tetapi tidak ada peraturan dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
3	Ada kebijakan tertulis yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, tetapi belum dituangkan dalam dokumen formal.
2	Ada kebijakan tidak tertulis yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
1	Tidak ada kebijakan tertulis tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum.
1.2 Pelibatan <i>stake-holders</i> (dosen, alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam penyusunan kurikulum.	
7	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna, dan pemerintah serta hasil <i>benchmark</i> di berbagai institusi lain.
6	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna, dan pemerintah.
5	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan alumni.
4	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.
3	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen saja.
2	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi saja.

1	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh ketua program studi saja.
1.3 Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum.	
7	Ada pedoman yang diperbaharui secara berkala, disertai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan.
6	Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan.
5	Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen analisis serta evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang telah dianalisis dan dievaluasi tetapi tidak ditindaklanjuti.
4	Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen pengembangan kurikulum program studi tetapi tidak dianalisis , dievaluasi, juga tidak ditindaklanjuti.
3	Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen namun tidak lengkap sebagai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.
2	Ada rencana penyusunan pedoman dan dokumen implementasi monitoring serta keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang terdokumentasi .
1	Tidak ada pedoman maupun dokumen implementasi monitoring kurikulum.
1.4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi	
7	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi termasuk <i>soft skills</i> , visi, dan misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum yang sistematis.
6	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum yang sistematis.
5	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum tetapi tidak sistematis.
4	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi yang lengkap.
3	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi namun tidak lengkap.
2	Tidak ada dokumen tertulis yang menyatakan kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi.
1	Tidak ada kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi institusi.
1.5 Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.	
7	Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala.
6	Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum tetapi tidak secara berkala.
5	Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat namun tidak ada mekanisme penyesuaian kurikulum.
4	Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, namun tidak lengkap.

3	Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2	Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum tidak sesuai dengan dengan perkembangan IPTEKS tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
1	Ada dokumen kurikulum tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.

B. STANDAR PROSES

2. Pengembangan Mutu Pembelajaran	
2.1 Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.	
7	Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi dalam dan luar negeri secara berkesinambungan.
6	Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam dan luar negeri.
5	Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam negeri.
4	Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri.
3	Ada unit yang mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran, tetapi hasilnya tidak belum dimanfaatkan oleh institusi sendiri.
2	Ada rencana pengembangan unit yang melakukan pengkajian maupun pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang terdokumentasi .
1	Tidak ada memiliki unit pengkajian dan tidak melakukan pengkajian maupun pengembangan sistem dan mutu pembelajaran.
2.2 Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan institusi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya.	
7	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor dan dievaluasi secara formatif dan sumatif secara berkala.
6	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup

	pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor dan dievaluasi secara formatif dengan baik.
5	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor dan dievaluasi baik.
4	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan yang dilaksanakan secara konsisten dan dimonitor dengan baik tetapi tidak dievaluasi.
3	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan yang dan pelaksanaannya konsisten tetapi tidak dimonitor dan tidak dievaluasi.
2	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan <i>tetapi</i> pelaksanaannya tidak konsisten, tidak dimonitor dan tidak dievaluasi.
1	Tidak ada sistem pengendalian mutu pembelajaran yang menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik.
2.3 Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma PT yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.	
7	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit dan ditingkatkan terus-menerus.
6	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta telah dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.
5	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta telah dilaksanakan secara konsisten di sebagian unit.
4	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, namun pelaksanaannya masih belum konsisten di seluruh unit.
3	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana tetapi tidak mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
2	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana tetapi tidak lengkap dan tidak diintegrasikan.

1	Tidak memiliki pedoman pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program Tri Dharma unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
2.4 Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa.	
7	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada seluruh unit dengan evaluasi secara berkala.
6	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada seluruh unit yang ada tetapi tidak dievaluasi secara berkala.
5	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian besar (70-99%) unit yang ada.
4	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian (35-69%) unit yang ada.
3	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian kecil (<35%) unit yang ada.
2	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran tetapi belum diimplementasikan.
1	Belum ada penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran.
2.5 Prosentase penerapan metode pembelajaran yang mempergunakan pendekatan <i>student-centered learning</i> dari seluruh program studi.	
7	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 85-100% <i>student centered learning</i> yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
6	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 70-84% <i>student centered learning</i> yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
5	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 50-69% <i>student centered learning</i> yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
4	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 30-49% <i>student centered learning</i> yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
3	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 10-29% <i>student centered learning</i> yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
2.	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan <10% <i>student centered learning</i> yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
1	Belum ada metode pembelajaran yang secara khusus dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.
2.6 Tingkat integrasi pelaksanaan program dan kegiatan akademik dalam pelaksanaan	

Tri Dharma PT.	
7	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma yang diimplementasikan secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi lain baik dalam dan luar negeri.
6	Ada program intergrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma yang diimplementasikan secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi lain di dalam negeri.
5	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma dan sudah diimplementasikan secara rutin pada internal perguruan tinggi.
4	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma namun diimplementasikan belum secara rutin pada internal perguruan tinggi.
3	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma namun belum diimplementasikan pada internal perguruan tinggi.
2	Belum ada integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma
1	Belum ada integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma
2.7 Tingkat pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri untuk peningkatan mutu pembelajaran.	
7	Setiap semester ada pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri tetapi tidak terprogram.
6	Setiap tahun ada pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri.
5	Dalam 2 tahun terakhir ada pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri.
4	Ada rencana pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri yang terdokumentasi.
3	Ada rencana pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran dari dalam negeri yang terdokumentasi.
2	Belum pernah melibatkan tenaga ahli/pakar dari dalam maupun luar negeri.
1	Belum pernah melibatkan tenaga ahli/pakar dari dalam maupun luar negeri.
3. Suasana Akademik	
3.1 Kejelasan dokumen kebijakan formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya.	
7	Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.
6	Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di sebagian besar unit.
5	Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi

	keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di sebagian kecil unit.
4	Ada dokumen kebijakan formal I yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik belum dilaksanakan.
3	Ada dokumen kebijakan formal yang tidak lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik belum dilaksanakan.
2	Belum ada dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik.
1	Belum ada dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik.
3.2	Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.
7	Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi serta ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan di sebagian besar unit.
6	Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi serta ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan di sebagian kecil unit.
5	Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk adanya kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.
4	Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsial dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.
3	Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsial dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi dan tidak ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.
2	Belum ada sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.
1	Belum ada sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.
3.3	Upaya PT mengembangkan kegiatan kemahasiswaan, pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa.
7	PT mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa yang aktif dengan aktivitas rutin dan ada reputasi di level nasional dan internasional.
6	PT mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas rutin dan ada reputasi nasional.
5	PT mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas rutin belum ada reputasi nasional.
4	PT mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas yang

	belum rutin.
3	PT mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa tetapi tidak ada aktivitas.
2	PT baru merencanakan pengembangan pusat olah raga, seni dan budaya.
1	PT belum merencanakan pengembangan pusat olah raga, seni dan budaya.

C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

4. Kelulusan Mahasiswa	
4.1 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi.	
7	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi <5%.
6	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 5-<10%.
5	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 10-<15%.
4	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 15-<20%.
3	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 20-<25%.
2	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 25-30%.
1	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi > 30%.
4.2 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi.	
7	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi >50%.
6	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 40%-50%.
5	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 30-<40%.
4	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 20-<30%.
3	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 10-<20%.
2	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi <10%.
1	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 0%.
4.3 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir.	
7	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4 tahun (S1) atau 3 tahun (D3).
6	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4,0-<4,5 tahun (S1) atau 3-<3,7 tahun (D3).
5	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4,5-<5,0 tahun (S1) atau 3,7-<4,0 tahun (D3).
4	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 5,0-<5,5 tahun (S1) atau 4,0-<4,3 tahun (D3).
3	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 5,5-<6,0 tahun (S1) atau 4,3-<4,6 tahun (D3).
2	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 6,0-<6,5 tahun (S1) atau 4,6-<5,0 tahun (D3).

1	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir ≥ 7 tahun.
4.4	Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi , mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.
7	Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi mencakup kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
6	Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi parsial mencakup kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tetapi tidak ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
5	Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi hanya parsial atau hanya mencakup tiga di antara elemen berikut kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4	Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi hanya parsial atau hanya mencakup dua di antara elemen berikut kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
3	Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi hanya parsial atau hanya mencakup satu di antara elemen berikut kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
2	PT sedang menyusun sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi.
1	Belum adanya sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi.
4.5	Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan.
7	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan $>50\%$.
6	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan $40-<50\%$.
5	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan $30-<40\%$.
4	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi

	pelacakan 25-<30%.
3	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 20-<25%.
2	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 10-<20%.
1	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan <10%.
4.6	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT dalam bentuk sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.
7	>25% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.
6	20-25% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.
5	15-<20% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.
4	10-<15% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan s sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran.
3	5-<10% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana dan sumbangan fasilitas.
2	Kurang dari 5 % dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana dan sumbangan fasilitas.
1	Belum ada alumni memberikan partisipasi dalam memberikan dana alumni dan bersifat monumental.
4.7	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama.
7	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama <3 bulan.
6	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama 3-6 bulan.
5	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 6 bulan hingga 9 bulan.
4	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 9 bulan hingga 12 bulan.
3	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 12 bulan hingga 15 bulan.
2	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 15 bulan hingga 18 bulan.
1	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama >18 bulan.
4.8	Persentase lulusan yang menjadi <i>entrepreneur</i> dalam tiga tahun terakhir
7	> 25 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i>
6	20-25 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i>
5	15-<20 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i> .
4	10-<15 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i> .

3	5-<10 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i> .
2	3-<5 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i> .
1	<3 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i> .
5. Prestasi Mahasiswa	
5.1 Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/ wilayah, nasional, dan internasional.	
7	>5% mahasiswa meraih prestasi di tingkat internasional.
6	3-5% mahasiswa meraih prestasi di tingkat internasional.
5	<3% mahasiswa meraih prestasi di tingkat internasional.
4	>10% mahasiswa meraih prestasi di tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah.
3	5-10% mahasiswa meraih prestasi di tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah.
2	<5% mahasiswa meraih prestasi di tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah.
1	Tidak ada mahasiswa yang meraih prestasi baik di tingkat internasional, nasional, maupun propinsi/wilayah.
5.2 Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.	
7	Adanya upaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram yang keberlanjutan.
6	Adanya upaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram.
5	Dua dari tiga upaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, penyediaan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi, dilakukan secara terprogram, tetapi satu di antaranya bersifat parsial.
4	Satu dari tiga upaya berikut bimbingan peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi, dilakukan secara terprogram dan konsisten.
3	Satu dari tiga upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram, tetapi belum konsisten.
2	Ada upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi tetapi tidak terprogram.
1	Belum ada upaya untuk memberi bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, dan pemberian kesempatan.

D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

6. Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	
6.1 Ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi perundangan.	
7	1:<31 (eksakta) atau 1:<100 (sosial).
6	1:30-35 (eksakta) atau 1:100-125(sosial).
5	1:35-40 (eksakta) atau 1:125-150(sosial).
4	1:40-45 (eksakta) atau 1:150-175(sosial).
3	1:45-50(eksakta) atau 1:175-200(sosial).
2	1:50-55(eksakta) atau 1:200-225 (sosial).
1	1:> 55 (eksakta) atau 1:>225 (sosial).
6.2 Ketersediaan tenaga kependidikan.	
7	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:<100.
6	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:100-150.
5	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:150-200.
4	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:200-250.
3	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:250-300.
2	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:300-350.
1	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:>350.
6.3 Ketersediaan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.	
7	PT memiliki 7 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten pada standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
6	PT memiliki 6 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten, dari 7 standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
5	PT memiliki 5 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten, dari 7 standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
4	PT memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten dari standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
3	PT memiliki upaya pengembangan tenaga dosen tetap dan tenaga kependidikan dan cukup baik, namun dukungan dana dari pihak institusi masih kurang, sehingga kurang memotivasi dosen dan tenaga kependidikan.
2	PT memiliki upaya dan komitmen institusi dalam pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan dan, tidak ada dukungan dana.
1	PT belum memiliki upaya pengembangan, padahal jumlah dosen dan tenaga

	kepedidikan masih belum memadai.
6.4	Ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
7	PT memiliki 3 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
6	PT memiliki 2 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen dari 3 bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
5	PT memiliki 1 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen dari 3 bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
4	PT memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti belum dilaksanakan secara konsisten.
3	PT memiliki pedoman tertulis yang lengkap; tetapi tidak dilaksanakan.
2	PT memiliki pedoman tertulis, tidak lengkap dan belum dilaksanakan.
1	PT belum memiliki dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi.

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
7.1	Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding.
7	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk setiap bahan pustaka berikut: (A) Buku teks dan perlengkapannya, (B) Skripsi, tesis, disertasi, (C) Jurnal nasional belum terakreditasi, (D) Jurnal nasional terakreditasi, (E) Prosiding nasional/internasional (F) Jurnal internasional dengan sangat memadai untuk semua program studi.
6	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A, B, C, D, E, dan F memadai untuk sebagian besar program studi.
5	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A, B, C, D, dan E dengan memadai untuk sebagian besar program studi.
4	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A, B, C, dan D dengan memadai untuk sebagian besar program studi.
3	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A, B, dan C dengan

	memadai untuk seluruh program studi.
2	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A dan B untuk sebagian besar program studi.
1	Tersedia koleksi perpustakaan, tetapi belum menggunakan <i>e-library</i> .
7.2	Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan pendayagunaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti tempat praktikum, bengkel/studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya.
7	Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan sarana dan prasarana “sangat memadai” (>75%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D. Rumah Sakit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya.
6	Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan “memadai” (sampai dengan 75%) penggunaan mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D. Rumah Sakit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya
5	Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan “memadai” (sampai dengan 50%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D. Rumah Sakit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya
4	Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan “belum memadai” (< 25%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D. Rumah Sakit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya
3	Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan “kurang memadai” (sampai dengan 50%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya
2	Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan “memadai” (sampai dengan 50%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, dan C. Ruang simulasi
1	Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan “kurang memadai” (sampai dengan 25%) mencakup: A. Tempat praktikum dan B. Bengkel/Studio
7.3	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olah

<p>raga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, <i>green area</i>, fasilitas <i>difable</i> dan ruang bimbingan dan konseling.</p>	
7	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana mencakup: (1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) <i>green area</i> , (7) fasilitas <i>difable</i> , (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.
6	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mencakup 7-8 dari: (1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) <i>green area</i> , (7) fasilitas <i>difable</i> , (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.
5	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mencakup 5-6 dari: (1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) <i>green area</i> , (7) fasilitas <i>difable</i> , (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.
4	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mencakup 4 dari: (1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) <i>green area</i> , (7) fasilitas <i>difable</i> , (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.
3	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mencakup 3 dari: (1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) <i>green area</i> , (7) fasilitas <i>difable</i> , (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.
2	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mencakup 1-2 dari: (1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) <i>green area</i> , (7) fasilitas <i>difable</i> , (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.
1	Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana seperti daftar di atas.
<p>8. Ketersediaan Sistem Informasi</p>	
<p>8.1 Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk <i>band width</i>, <i>hardware</i>, <i>software</i>, <i>e-learning</i>, dan <i>on-line journal/library</i>, dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.</p>	
7	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>bandwidth</i> dan <i>hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i>

	dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.
6	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width</i> dan <i>hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 3 dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.
5	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width</i> dan <i>hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 2 dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.
4	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width</i> dan <i>hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 1 dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.
3	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width</i> dan <i>hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan tidak ada pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.
2	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.
1	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width hardware</i> , 2. <i>software</i> , dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.
8.2	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non-akademik yang mencakup <i>hardware</i> dan <i>software</i>.
7	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk: 1. Proses Perkuliahan, 2. Administrasi Akademik, 3. Administrasi Umum, 4. Administrasi keuangan, 5. Pengelolaan Sarana dan prasarana, dan 6. Kerjasama.
6	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 5 di antara 6 dari daftar.
5	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 4 di antara 6 dari daftar.
4	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 3 di antara 6 dari daftar.
3	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 2 di antara 6 dari daftar.
2	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 1 di antara 6 dari daftar.
1	Sistem informasi dalam administrasi belum satupun digunakan dan belum ada rencana pengembangan.

8.3 Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai	
7	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> > 25 kbps per mahasiswa
6	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> 15 - 25 kbps per mahasiswa
5	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> 5 - <15 kbps per mahasiswa
4	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> 1 - <5 kbps per mahasiswa
3	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> 0,5 - <1 kbps per mahasiswa
2	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> <0,5 kbps per mahasiswa
1	Belum ada fasilitas internet
8.4 Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	
7	Data dikelola dengan komputer yang sangat terintegrasi, serta dapat diakses melalui jaringan internet.
6	Data dikelola dengan komputer yang terintegrasi, serta dapat diakses melalui jaringan internet.
5	Data dikelola dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas internet (<i>Wide Area Network, WAN</i>).
4	Data dikelola dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan lokal (<i>Local Area Network, LAN</i>).
3	Data dikelola dengan komputer tanpa jaringan.
2	Data dikelola secara manual.
1	Belum ada penanganan data.
8.5 <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi yang lengkap.	
7	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi sangat lengkap, mengimplementasikan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang sangat cepat didukung pendanaan yang sangat memadai.
6	<i>Blue print</i> pengembangan dan pengelolaan sangat lengkap, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi, mengimplementasikan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang sangat cepat didukung pendanaan yang memadai.

5	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan sistem informasi, dan pengamanan sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat didukung dengan pendanaan yang memadai.
4	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan sistem informasi, dan pengamanan sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat, namun masih terbatas dengan pendanaan.
3	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, dan pengamanan. cukup sesuai dengan kebutuhan saat ini.
2	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, dan pengamanan. belum jelas.
1	Belum tersedia <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, dan pengamanan.

F. STANDAR PENGELOLAAN

9. Tata Pamong	
9.1 Kelengkapan dan kejelasan tata organisasi yang memungkinkan implementasi secara konsisten.	
7	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 8 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma.
6	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 7 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma.

5	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 6 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencana dan pengembangan Tri Dharma.
4	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 5 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencana dan pengembangan Tri Dharma.
3	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 4 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencana dan pengembangan Tri Dharma.
2	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 3 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencana dan pengembangan Tri Dharma.
1	PT belum memiliki kelengkapan organ dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi.

10. Kepemimpinan

10.1 Karakteristik kepemimpinan yang efektif.

7	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan
---	---

	memiliki pedoman, serta ada bukti efektivitas kepemimpinan.
6	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki tiga karakteristik berikut, (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti efektivitas kepemimpinan.
5	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki tiga dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik tidak memiliki pedoman, tetapi ada bukti efektivitas kepemimpinan.
4	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki dua dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman dan ada bukti efektivitas kepemimpinan.
3	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki dua dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti efektivitas kepemimpinan.
2	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki satu dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman dan ada bukti efektivitas kepemimpinan.
1	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki satu dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti efektivitas kepemimpinan.

10.2 Kejelasan sistem pengelolaan fungsional dan operasional PT.

7	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan pedoman pengelolaan dan bukti berupa dokumen pengelolaan.
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan pedoman pengelolaan, tetapi tanpa bukti berupa dokumen pengelolaan.
5	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup empat dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan bukti berupa dokumen pengelolaan.
4	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup empat dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan dan tidak

	ada bukti dokumen pengelolaan.
3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup tiga dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi dilengkapi oleh ada bukti dokumen pengelolaan.
2	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup tiga dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan.
1	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup dua dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan dan tidak ada bukti dokumen pengelolaan.

11. Sistem Pengelolaan

11.1 Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial.

7	Perguruan tinggi memiliki dokumen: (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
6	Perguruan tinggi memiliki 4 dari 5 aspek yaitu dokumen: (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
5	Perguruan tinggi memiliki 3 dari 5 aspek yaitu dokumen: (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
4	Perguruan tinggi memiliki 2 dari 5 aspek yaitu dokumen: (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
3	Perguruan tinggi memiliki 1 dari 5 aspek yaitu dokumen: (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang

	sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
2	Perguruan tinggi memiliki 1 dari 5 aspek yaitu dokumen: (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
1	Perguruan tinggi tidak memiliki kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif.
11.2 Diseminasi hasil kinerja PT sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya	
7	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> , minimal setiap tahun.
6	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> , minimal setiap tiga tahun.
5	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> , minimal setiap lima tahun.
4	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala minimal setiap tahun, tetapi hanya untuk internal <i>stakeholders</i> .
3	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala minimal tiga tahun, tetapi hanya untuk internal <i>stakeholders</i> .
2	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada internal <i>stakeholders</i> , tetapi tidak dilakukan secara berkala.
1	Perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada <i>stakeholders</i> .
Seleksi Mahasiswa Baru	
12.1 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas.	
7	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan atas dasar apa pun juga.
6	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan gender.

5	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan gender dan asal mahasiswa.
4	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan gender dan asal mahasiswa serta kemampuan finansial orang tua mahasiswa.
3	Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan gender, asal mahasiswa, kemampuan finansial orang tua mahasiswa dan etnis.
2	Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan gender, asal mahasiswa, kemampuan finansial orang tua mahasiswa, etnis serta kepercayaan mahasiswa.
1	Sistem penerimaan mahasiswa baru secara tertutup.
12.2	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa.
7	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dari mana pun asalnya.
6	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dari manapun asalnya dengan kuota tertentu bagi mahasiswa asing.
5	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dari manapun asalnya dengan kuota tertentu bagi mahasiswa asing dari ASEAN serta LUAR ASEAN.
4	Sistem Penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah NKRI.
3	Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari pulau tempat perguruan tinggi berada.
2	Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari propinsi tempat perguruan tinggi berada.
1	Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari daerah. tempat perguruan tinggi berada.
12.3	Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya.

7	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya.
6	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dengan sistem pengambilan keputusan yang jelas.
5	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dengan sistem pengambilan keputusan yang fleksible.
4	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, dan instrument sitem pengambilan keputusan yang tidak jelas.
3	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, tanpa prosedur dan instrumen sistem pengambilan keputusan.
2	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang bergantung pada kebijakan pimpinan.
1	Keputusan penerimaan mahasiswa baru tanpa prosedur yang jelas.
12.4	Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus.
7	Lebih dari 20% mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program tanpa membayar finansial dan semua mendapat beasiswa.
6	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pengaturan finansial yang sudah diatur sistem subsidi dan beasiswa.
5	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan finansial yang diatur sistem subsidi dan pinjaman.
4	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan finansial karena sudah diatur sistem subsidi.
3	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan finansial yang memungkinkan dibayar jangka panjang.
2	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program

	dengan pertimbangan finansial yang memungkinkan dibayar jangka pendek.
1	Hanya mahasiswa baru dengan kemampuan finansial tertentu dapat diterima.
12.5	Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi.
7	Kurang 10 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
6	10-20 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
5	20-<40% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
4	40-<60 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
3	60-<80% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
2	80-<100 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
1	100 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
12.6	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.
7	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi >95%.
6	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 80-95%.
5	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 70-<80%.
4	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 60-<70%.
3	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 50-<60%.
2	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 40-<50%.
1	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi <40%.
12.7	Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer.
7	Kurang 10% mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
6	10-20 % mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.

5	20-<40 % mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
4	40-<60 % mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
3	60-80 % mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
2	80-<100 % mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
1	100 % mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.

13. Kualitas Layanan kepada Mahasiswa

13.1 Kejelasan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.

7	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) proses perkuliahan; (2) perpustakaan; (3) olah raga/beladiri; (4) seni; (5) kesehatan; (6) lainnya, yang dilaksanakan secara berkala setiap semester untuk butir (1) dan tahunan untuk (2) – (6).
6	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan tahunan untuk 4 hal di antara (2) – (6).
5	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan tahunan untuk 3 hal diantara (2) – (6).
4	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan untuk 3 hal diantara (2) – (6) dilakukan setiap 2-3 tahunan.
3	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan 2 hal diantara (2) – (6) dilakukan setiap 2-3 tahunan.
2	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah,

	andal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan dan 2 hal diantara (2) – (6) dilakukan secara tidak berkala/teratur.
1	Belum memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.
13.2 Hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya.	
7	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
6	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, namun tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
5	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang kurang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
4	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang kurang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, tetapi tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
3	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, tetapi tidak dianalisis dengan metode yang tepat, dan digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
2	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan tetapi tidak dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
1	Belum ditemukan laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan.
13.3 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan <i>soft skills</i>, beasiswa, dan kesehatan.	
7	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan <i>soft skills</i> , (4) beasiswa dan (5) kesehatan.

6	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam <u>4 dari 5</u> aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan <i>soft skills</i> , (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
5	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam <u>3 dari 5</u> aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan <i>soft skills</i> , (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
4	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam <u>2 dari 5</u> aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan <i>soft skills</i> , (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
3	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam <u>1 dari 5</u> aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan <i>soft skills</i> , (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
2	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam <u>1 dari 5</u> aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan <i>soft skills</i> , (4) beasiswa dan (5) kesehatan namun kurang representatif.
1	Tidak ada layanan kepada mahasiswa.
13.4 Ketersediaan program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	
7	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
6	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup <u>4 dari 5</u> aspek: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
5	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup <u>3 dari 5</u> aspek: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
4	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup <u>2 dari 5</u> aspek: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
3	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup <u>1 dari 5</u> aspek: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan

	karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
2	PT sedang mengembangkan dokumen formal kebijakan dan pelaksanaan layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan
1	PT belum memiliki dokumen formal kebijakan dan pelaksanaan layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan.
14. Sistem Penjaminan Mutu	
14.1 Keberadaan sistem penjaminan mutu internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.	
7	PT memiliki Komitmen pengembangan Mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu, yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, dan ada bukti dokumen pelaksanaannya.
6	PT memiliki Komitmen pengembangan Mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu, tidak terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, tetapi ada bukti dokumen pelaksanaannya.
5	PT memiliki Komitmen pengembangan Mutu yang lengkap, meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, tetapi tidak ada bukti-bukti dokumen pelaksanaannya.
4	PT memiliki Komitmen pengembangan Mutu yang lengkap, meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu, tetapi tidak terintegrasi dalam suatu sistem dokumen dan tidak ada bukti dokumen pelaksanaannya.
3	PT memiliki hanya 5 dari 7 Komitmen pengembangan Mutu sebagai berikut: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu
2	PT memiliki hanya 3 dari 7 Komitmen pengembangan Mutu sebagai berikut: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu

1	PT memiliki kurang dari 3 Komitmen pengembangan Mutu sebagai berikut: (1) Pernyataan Mutu, (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu.
14.2 Penerapan sistem penjaminan mutu dan pelaksanaannya.	
7	Tercapainya sasaran penjaminan mutu sesuai SNP ditambah stándar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta dikembangkan secara berkelanjutan.
6	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu sesuai SNP ditambah stándar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, tetapi belum dikembangkan
5	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindak lanjuti dan sudah dikembangkan
4	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti tetapi belum dikembangkan
3	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi tetapi tidak disosialisasikan dengan baik.
2	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan, tetapi tidak ada di bidang penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
1	Belum tersedianya hasil monitoring sasaran penjaminan mutu.
14.3 Keberadaan sistem audit mutu internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT.	
7	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya digunakan serta didiseminasikan kepada semua <i>stakeholders</i> .
6	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit, dan hasilnya digunakan didiseminasikan terbatas secara internal.

5	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit, dan hasilnya digunakan tetapi tidak didiseminasikan.
4	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit tetapi hasilnya tidak digunakan serta tidak didiseminasikan.
3	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, tetapi belum digunakan untuk mengukur kinerja tiap unit.
2	Perguruan tinggi memiliki kriteria kinerja setiap unit kerja tetapi tidak memiliki instrumen penilaian untuk mengukur kinerja unit kerjanya.
1	Perguruan tinggi tidak memiliki kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja unit kerjanya.
14.4 Sistem monitoring dan evaluasi implementasi penjaminan mutu serta tindak lanjutnya.	
7	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
6	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana (5) keuangan, (6) manajemen, yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik tetapi tidak ditindaklanjuti secara komprehensif.
5	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai <u>5 dari 6</u> di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
4	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai <u>4 dari 6</u> di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
3	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai <u>3 dari 6</u> di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
2	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai 2 dari 6 di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada

	masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
1	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai 1 dari 6 di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.

G. STANDAR PEMBIAYAAN

15. Pengelolaan Dana	
15.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana.	
7	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap, dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di seluruh unit kerja.
6	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap, dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di sebagian unit kerja.
5	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap, belum dilaksanakan secara konsisten.
4	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa belum jelas dan lengkap, serta belum dilaksanakan.
3	Ada dokumen kebijakan pengelolaan dana, tetapi belum ada standar prosedur operasional pengelolaan keuangan.
2	Sedang dikembangkan dokumen kebijakan pengelolaan dana, ada standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan ada dokumen lelang pekerjaan barang atau jasa.
1	Tidak ada dokumen kebijakan pengelolaan dana.

15.2 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> (unit bisnis/ usaha/ ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya per tahun.	
7	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya >20% dari total pembiayaan pendidikan.
6	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 15-20% dari total pembiayaan pendidikan.
5	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 10-<15% dari total pembiayaan pendidikan.
4	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 5-<10% dari total pembiayaan pendidikan.
3	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 3%-<5% dari total pembiayaan pendidikan.
2	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya <3% dari total pembiayaan pendidikan.
1	Tidak ada sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya.
15.3 Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
7	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya
6	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan dan dosen
5	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan
4	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan unsur pimpinan dan dosen dilakukan secara transparan tetapi tidak akuntabel.
3	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan unsur pimpinan secara transparan tetapi tidak akuntabel.
2	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan unsur pimpinan

	tetapi dilakukan secara tidak transparans dan tidak akuntabel.
1	Tidak ada pedoman.
15.4 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa.	
7	Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan semua unsur pimpinan, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya
6	Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan semua unsur pimpinan dan dosen
5	Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan semua unsur pimpinan.
4	Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa tetapi tidak melibatkan semua unsur pimpinan.
3	Ada pedoman mekanisme yang tidak jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa walaupun sudah melibatkan unsur pimpinan.
2	Ada pedoman mekanisme yang tidak jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa dan tidak melibatkan unsur mana pun.
1	Tidak ada pedoman.
15.5 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan.	
7	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan <50%.
6	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 50-60%.
5	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 61-70%.
4	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 71-80%.
3	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 81-90%.
2	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 91-99%.

1	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 100%.
15.6 Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa.	
7	Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan semua unsur pimpinan, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya
6	Ada pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan semua unsur pimpinan dan dosen
5	Ada pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan semua unsur pimpinan
4	Ada pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan tetapi tidak melibatkan semua unsur pimpinan.
3	Ada pedoman mekanisme dan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, namun tidak lengkap walaupun sudah melibatkan unsur pimpinan.
2	Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa tetapi tidak jelas.
1	Tidak ada kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa.
15.7 Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat.	
7	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 75%-90% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
6	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 67,5% -< 75% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
5	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 50% -< 67,5% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
4	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 35% -< 50% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.

3	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 22,5% -< 35% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
2	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 10% -< 22,5% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
1	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar < 10% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
15.8 Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.	
7	Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, (2) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal, (3) bukti pelaksanaan monitoring dan (4) bukti pelaksanaan evaluasi keuangan internal yang lengkap.
6	Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, (2) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal, dan (3) bukti pelaksanaan monitoring.
5	Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, dan (2) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal dengan (3) bukti pelaksanaan tidak lengkap.
4	Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal dengan (2) bukti pelaksanaan yang baik tetapi tanpa ada evaluasi pendanaan internal.
3	Ada (1) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal dengan (2) bukti pelaksanaan yang baik tetapi tanpa ada monitoring pendanaan internal.
2	Ada standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, atau ada standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal tetapi bukti pelaksanaan tidak lengkap.
1	Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.
15.9 Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	
7	Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal, ada audit eksternal (akuntan publik) dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
6	Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal, dan ada evaluasi audit eksternal (akuntan publik) tetapi hanya dapat diakses oleh sebagian pemangku

	kepentingan
5	Ada laporan keuangan yang transparan tetapi hanya dilakukan audit internal.
4	Ada laporan keuangan yang transparan tanpa audit internal dan eksternal.
3	Hanya ada evaluasi audit internal.
2	Laporan keuangan tidak transparan.
1	Tidak ada laporan keuangan.

H. STANDAR PENILAIAN

16. Evaluasi Hasil Belajar	
16.1 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan.	
7	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan, selalu ditinjau secara berkala, dan telah diverifikasi oleh <i>stakeholder</i> .
6	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan, ditinjau secara insidental, dan telah diverifikasi oleh <i>stakeholder</i> .
5	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan ditinjau serta telah diverifikasi oleh <i>stakeholder</i> .
4	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan selalu ditinjau secara berkala.
3	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan ditinjau secara insidental.
2	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan tetapi tidak pernah ditinjau.
1	Sistem evaluasi hasil belajar yang telah diterapkan belum sesuai dengan ranah kompetensi lulusan
16.2 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat.	
7	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap empat tahun dan dilaksanakan dengan melibatkan <i>stakeholder</i> .
6	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap empat tahun dan dilaksanakan tetapi belum melibatkan <i>stakeholder</i> .
5	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan secara periodik setiap delapan tahun dengan melibatkan dan <i>stakeholder</i> .
4	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang

	tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap delapan tahun dan tidak melibatkan <i>stakeholder</i> .
3	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap dua belas tahun dan dilaksanakan tidak melibatkan <i>stakeholder</i> .
2	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat tetapi tidak pernah disesuaikan dengan perkembangan.
1	PT tidak menerapkan Sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat.
16.3	Kesesuaian butir-butir soal dengan <i>luaran pembelajaran</i> yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus.
7	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran (learning outcome)</i> sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik setiap tahun.
6	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap tiga tahun.
5	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap lima tahun.
4	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap sepuluh tahun.
3	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> tetapi belum didasarkan atas isi silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap tiga tahun.
2	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi belum sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> dan selalu ditinjau secara periodik tiap tiga tahun.
1	Butir-butir soal belum dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi dan belum disesuaikan dengan <i>luaran pembelajaran</i> .
16.4	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian/ pejabat yang bertanggung jawab.
7	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari <i>peer reviewer</i> secara berkala setiap tahun.
6	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari <i>peer reviewer</i> secara berkala setiap semester.
5	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari <i>peer reviewer</i> secara berkala setiap dua tahun.
4	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodik setiap semester dan tidak melibatkan <i>peer reviewer</i> .

3	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodik setiap semtahun dan tidak melibatkan <i>peer reviewer</i> .
2	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodik setiap dua tahun tetapi dan tidak melibatkan <i>peer reviewer</i> .
1	Tidak ada <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester).
16.5 Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).	
7	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang direview oleh tim secara berkala setiap tiga tahun.
6	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang direview oleh tim secara berkala setiap lima tahun.
5	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang direview oleh tim secara berkala setiap tujuh tahun.
4	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang tidak pernah direview oleh tim.
3	PT memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang tidak pernah direview oleh tim.
2	PT memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) dan tidak pernah direview oleh tim.
1	PT tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).
16.6 Ketersediaan mekanisme/pedoman perbaikan nilai.	
7	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap empat tahun.
6	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap delapan tahun.
5	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap dua belas tahun.
4	PT memiliki pedoman yang kurang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap empat tahun.
3	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap delapan tahun.
2	PT memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap empat tahun.
1	PT tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai.

I. STANDAR PENELITIAN

17. Capaian Penelitian	
17.1 Kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan penelitian.	
7	Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar implementasi, monitoring, dan evaluasi penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (4 aspek).
6	Ada pedoman yang jelas dan namun belum lengkap tentang kebijakan dasar implementasi penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (4 aspek).
5	Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (3 aspek).
4	Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (2 aspek).
3	Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (1 aspek).
2	Sedang dikembangkan pedoman pelaksanaan penelitian serta dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak.
1	Belum ada pedoman pelaksanaan penelitian serta dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak.
17.2 Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional, nasional dan internal tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional sebanyak >40%.
6	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional 20- 40%.
5	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional 10-<20%.
4	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional <10%, nasional >40%.
3	Ada dosen yang menjalankan penelitian tingkat nasional, dengan persentase <40%.
2	Sudah ada dosen yang menjalankan penelitian internal.

1	Belum ada dosen yang menjalankan penelitian.
17.3 Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari institusi internasional, nasional dan lokal tiga tahun terakhir.	
7	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi internasional sebanyak >25% dari total dana penelitian.
6	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi internasional 10- 25% dari total dana penelitian.
5	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi nasional sebanyak > 25% dari total dana penelitian.
4	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi nasional 10- 25% dari total dana penelitian.
3	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana internal sebanyak \geq 25% dari total dana penelitian.
2	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana internal di bawah <25% dari total dana penelitian.
1	Belum ada besaran dan proporsi dana penelitian atau <i>funding</i> yang diperoleh.
17.4 Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah artikel yang tersitasi tiga tahun terakhir.	
7	Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional >25%.
6	Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional 15-25%.
5	Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional 5-<15%.
4	Persentase publikasi artikel ilmiah antara 30-50% dengan sebaran utama dalam jurnal nasional.
3	Persentase publikasi artikel ilmiah di atas 10-<30% dengan sebaran utama dalam jurnal nasional.
2	Persentase publikasi artikel ilmiah <10% dengan sebaran utama dalam jurnal nasional.
1	Belum ada publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional.
17.5 Persentase publikasi buku tiga tahun terakhir.	
7	Persentase publikasi buku >25% diterbitkan oleh penerbit internasional
6	Persentase publikasi buku 15-25% diterbitkan oleh penerbit internasional.
5	Persentase publikasi buku 5-<15% diterbitkan oleh penerbit internasional.
4	Persentase publikasi buku >25% diterbitkan oleh penerbit nasional.
3	Persentase publikasi buku 10-25% diterbitkan oleh penerbit nasional.
2	Persentase publikasi buku <10% diterbitkan oleh penerbit nasional.
1	Belum ada buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional.
17.6 Jumlah paten.	
7	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> > 50, dan ada yang telah dikomersialisasikan.
6	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> 25-50.
5	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> 15-<25.
4	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> 10-<15.

3	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> <10.
2	Jumlah paten yang telah didaftarkan kurang dari 50, belum ada yang dikabulkan/ <i>granted</i> .
1	Belum ada paten yang didaftarkan untuk diajukan paten.
17.7	Jumlah prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan.
7	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat internasional sebanyak > 25%.
6	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat internasional 15-25%.
5	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat internasional 5-<15%.
4	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat nasional >25%.
3	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat nasional 10-25%.
2	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat nasional <10%.
1	Belum ada prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan.
17.8	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> tiga tahun terakhir.
7	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional >10%.
6	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional 5-10%.
5	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional <5%.
4	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional >10%.
3	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional 5-10%.
2	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional <5%.
1	Belum ada dosen yang menjadi <i>invited speaker</i> di tingkat internasional maupun nasional.
17.9	Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir.
7	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah internasional >25%.
6	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah internasional 15-25%.
5	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah internasional 5-<15%.
4	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah

	nasional >25%.
3	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah nasional 10-25%.
2	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah nasional <10%.
1	Belum ada dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah nasional.
17.10	Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir.
7	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional >50%.
6	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional 40-50%.
5	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional 30-<40%
4	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional >50%.
3	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional 40-50%.
2	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional 30-<40%.
1	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional <30%.
17.11	Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan institusi per tahun.
7	Jumlah pertemuan ilmiah internasional sebanyak >10.
6	Jumlah pertemuan ilmiah internasional 5-10.
5	Jumlah pertemuan ilmiah internasional <5.
4	Jumlah pertemuan ilmiah nasional >50.
3	Jumlah pertemuan ilmiah nasional 20-50.
2	Jumlah pertemuan ilmiah nasional <20.
1	Belum ada pertemuan ilmiah internasional dan nasional.
17.12	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah taraf internasional/regional , nasional, dan internal tiga tahun terakhir.
7	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional >10%.
6	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional 5-10%.
5	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional <5%.
4	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional >10%.
3	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional 5-10%.
2	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional <5%.
1	Tidak ada dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional dan internasional.

J. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

18. Capaian Pengabdian kepada Masyarakat	
18.1 Kejelasan kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat	
7	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian, dilaksanakan di seluruh unit kerja secara konsisten.
6	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian, dilaksanakan di sebagian unit kerja secara konsisten.
5	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di seluruh unit kerja secara konsisten.
4	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di sebagian unit kerja secara konsisten.
3	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di seluruh unit kerja, belum secara konsisten.
2	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di sebagian unit kerja, belum secara konsisten.
1	Tidak adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat.
18.2 Kejelasan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	
7	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh semua unit kerja secara konsisten.
6	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh sebagian unit kerja secara konsisten.
5	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh semua unit kerja, belum secara konsisten.
4	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh sebagian unit kerja, belum secara konsisten.
3	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku namun belum dilaksanakan.
2	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang belum baku.
1	Tidak adanya pedoman pengelolaan pengabdian masyarakat.
18.3 Persentase dosen yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat tiga tahun terakhir.	
7	>50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
6	40-50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
5	30-<40% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
4	20-<30% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
3	10-<20% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
2	5-<10% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
1	<5% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
18.4 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian tiga tahun terakhir.	
7	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian >50% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian mencapai 40-50% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 30-<40% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 20-<30% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 10-<20% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian <10% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
1	Belum ada pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian.
18.5 Persentase dana yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat >30%.
6	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 20-30%.
5	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 15-<20%.
4	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 10-<15%.
3	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 5-10%.
2	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat <5%.
1	Tidak ada persentase dana yang diperoleh dipergunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
18.6 Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada masyarakat.	
7	Institusi memiliki >10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional.
6	Institusi 5-10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional.
5	Institusi <5 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional.
4	Institusi memiliki >10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional.
3	Institusi memiliki 5-10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional.
2	Institusi memiliki <5 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional.
1	Belum pernah memperoleh penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat.

K. STANDAR KERJASAMA

19. Capaian Kerjasama	
19.1 Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam kegiatan kerjasama.	
7	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di seluruh unit kerja secara konsisten.
6	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan

	kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di sebagian unit kerja secara konsisten.
5	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di seluruh unit kerja belum secara konsisten.
4	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di sebagian unit kerja belum secara konsisten.
3	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas tetapi belum dilaksanakan.
2	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama belum lengkap dan jelas dan belum dilaksanakan.
1	Tidak adanya dokumen kebijakan dan pengelolaan oleh perguruan tinggi dalam kegiatan kerja sama.
19.2 Jumlah kerjasama/MoU tiga tahun terakhir.	
7	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional mencapai >100, dan $\geq 80\%$ di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
6	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional mencapai >100, tetapi hanya 50-80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
5	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional berkisar 50-100, dan $\geq 80\%$ di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
4	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional berkisar 50-100, tetapi hanya 50-80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
3	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional kurang dari 50, dan $\geq 80\%$ di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
2	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional kurang dari 50, dan hanya 50-80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
1	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional kurang dari 50, dan kurang dari 50% di antaranya telah ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
19.3 Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional >30%.
6	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional 20-30%.
5	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional <20%.
4	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan

	nasional >30%.
3	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional 20-30%.
2	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional 10-<20%.
1	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional <10%.
19.4	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir.
7	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma > 30%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
6	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 25-30%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
5	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 20-<25%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
4	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 15-<20%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
3	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 10-<15%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
2	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma < 10%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
1	Belum ada dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma di tingkat internasional maupun nasional.
19.5	Persentase pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir.
7	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma >20%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
6	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 15-20%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
5	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 10-<15%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
4	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 5-<10%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
3	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma kurang dari 5%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
2	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma < 5%, belum ada di tingkat internasional.
1	Belum ada mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma di tingkat internasional maupun nasional.
19.6	Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama.
7	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak, di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
6	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak, di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan belum secara berkelanjutan.
5	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak luar negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
4	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak luar negeri yang dilaksanakan

	belum secara berkelanjutan.
3	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di dalam negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di dalam negeri yang dilaksanakan belum secara berkelanjutan.
1	Belum ada akses perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama.
19.7	Jumlah mahasiswa internasional dari total mahasiswa
7	> 5%
6	4%-5%
5	3%-4%
4	2%-3%
3	1%-2%
2	1%
1	Belum ada mahasiswa internasional